

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah berimbas pada pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berguna untuk memaksimalkan penerimaan daerah demi kemakmuran kehidupan masyarakat. APBD dapat digunakan untuk menjalankan program kerja yang sudah dirancang sesuai keputusan para pejabat daerah. Kenyataannya, tidak jarang perancangan APBD sejalan dengan kepentingan politis dan birokrasi pemerintahan. Konflik kepentingan ini dijumpai oleh sebuah teori yaitu Teori Pilihan Rasional. Teori ini berupaya menjadi solusi antara ekonomi menengah dan politik dengan memperhatikan perilaku masyarakat, pelaku politik, dan wakil rakyat serta melihat bagaimana memilih sikap yang tepat untuk perumusan kegiatan publik yang ditetapkan seperti penyusunan APBD. (Sari 2016).

Keberhasilan tata kelola pemerintahan, seharusnya berbanding lurus dengan kemampuan suatu wilayah atau daerah dalam mengelola kekayaan daerah, dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang optimal seharusnya dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya, baik dari segi pendapatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan sehingga tercapai pembangunan manusia yang berkualitas dalam wujud capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kualitas manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Dalam publikasinya, Badan Pusat Statistik telah merubah beberapa indikator yang sudah tidak tepat lagi untuk digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik, sehingga diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Prihastuti, 2018).

Sebagai wujud upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik (Lilis Setyowati & Yohana Kus Suparwati, dalam penelitian Yanto Dkk 2018).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nur Isa Pratowo, dalam penelitian Yanto Dkk 2018. yang menjelaskan bahwa, dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, perlu kebijakan penganggaran dengan memperbesar komposisi anggaran belanja agar lebih terfokus pada program sasaran dan memperkecil belanja yang berupa upah atau gaji atau honor birokrat atau mitra pelaksana program. Program sasaran yang dimaksud adalah di bidang kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja serta memperluas pasar produk-produk regional agar meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak.

UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investment) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga terdapat sumber lain yang menjadi pembiayaan berupa pinjaman daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi .

Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan cara melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal serta

mengevaluasi ketidakefisienan yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Karakteristik pengelolaan sumber daya keuangan dapat digambarkan dalam pengelolaan aset yang tersaji dalam neraca yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi daerah seharusnya merupakan basis utama bagi daerah, sehingga keetergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin berkurang dan pada akhirnya daerah memiliki kekuatan dalam memenuhi segala kebutuhannya terkait dengan prosedur pelayanan publik. Sedangkan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh (Yanto,dkk 2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Berbeda dengan penelitian Anggraini dan Sutaryo (2015) membuktikan

bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan digunakan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Tumpal Manik (2013) melakukan penelitian dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. berbeda dengan penelitian Rahmayanti dan Pertiwi (2018) yang menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan kepada kelompok belanja administrasi umum (Halim; 2004).Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Yanto dkk (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi Pembangunan Manusia telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu Tumpal Manik (2013), Edi Yanto, dkk(2018), Anim dan Imanda (2018) .Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas, Dalam penelitian tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) ,dan belanja modal. Dalam penelitian ini menambah satu variabel yaitu aset daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH ASET DAERAH , PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi jawa tengah tahun 2014-2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah aset daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
2. Apakah PAD berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh aset daerah terhadap indeks pembangunan manusia
2. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia.
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengenai pengaruh aset daerah, PAD, dana perimbangan dan Belanja Modal terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

2. Bagi Peneliti

penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat menambah wawasan mengenai indeks pembangunan manusia

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, terutama mengenai pengaruh aset daerah, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga dapat menjadi bahan referensi atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori, kerangka konseptual, serta penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, pengukuran variabel, instrumen penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang diperlukan, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, keterbatasan, dan saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian, dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.